Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah*

Gustini Listiani Sari

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: gustinilistianisarii@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* terhadap kabulnya permohonan perkawinan beda agama antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah dan akan ditinjau berdasarkan *saddu al-dzari'ah*. artikel ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh dalam artikel ini adalah salinan putusan pada website Mahkamah Agung yakni penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif guna memaparkan *ratio decidendi* dan menganalisis dengan *saddu al-dzari'ah* terkait penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa *ratio decidendi* yang ditetapkan oleh Hakim dalam penetapan tersebut adalah Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989; Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia; dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan berdasarkan *saddu al-dzari'ah*, perkawinan beda agama ini hanya sah secara administratif negara namun tidak sah menurut agama meskipun terdapat dugaan *mafsadat* dan terdapat *mashlahah* dalam penetapan tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama; *sadd al-dzari'ah*; Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Pendahuluan

Hakikat dari sebuah perkawinan dalam seluruh agama menghendaki perkawinan seagama, seperti dalam Islam salah satu syarat sah perkawinan adalah tidak ada penghalang perbedaan agama. Menurut katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan oleh pejabat gereja diberkati dan diteguhkan. Menurut agama Protestan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan harus dicatikan oleh pejabat sipil, menurut agama Hindu, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah sesuai dengan upacara agama Hindu dan yang terakhir menurut agama Budha, perkawinan adalah sah jika memiliki agama yang sama karena harus sesuai dengan tata cara perkawinan agama Budha.¹ Namun di Pengadilan Negeri Makassar terdapat penetapan hakim yang

---

¹Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 35-42.

mengabulkan terhadap permohonan perkawinan beda agama dengan perkara nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks

Beberapa artikel sebelumnya yang berjudul ‘Implementasi Maqashid al-Syari’ah dalam putusan Bahts Al-Masail tentang Perkawinan Beda Agama’ memperkuat bahwa perkawinan beda agama dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syari’ah. Meskipun setema dalam pembahasan perkawinan beda agama, namun artikel tersebut secara spesifik membahas keputusan bahts al-masail tentang perkawinan beda agama berdasarkan maqashid al-syariah² sedangkan artikel ini membahas penetapan hakim atas permohonan perkawinan beda agama yang dianalisis berdasarkan konsep *saddu al-dzari’ah*. Begitu juga dengan artikel lain yang berjudul ‘Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)’³ yang memiliki persamaan dengan artikel ini dalam pembahasan penetapan hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama melalui pendekatan kasus, namun berbeda dengan artikel ini yang juga menggunakan pendekatan konseptual berupa konsep *saddu al-dzari’ah*. Selain itu juga ditemukan artikel yang berjudul ‘Tinjauan *Sadd al-Dzari’ah* Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif’ yang hanya membahas pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab saja.⁴ Hal itu berbeda dengan artikel ini yang membahas pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah. Selain itu penelitian ini membahas penetapan hakim tentang pernikahan tersebut yang berbeda dengan artikel sebelumnya yang membahas problematika hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dalam hukum positif. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas penetapan hakim atas permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan terhadap permohonan perkawinan beda agama dengan perkara nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks. ditinjau dari konsep *saddu al-dzari’ah*.

Permohonan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon I beragama Kristen sebagai calon suami dan pemohon II beragama Islam sebagai calon isteri. Pemohon mengajukan perkawinan beda agama karena tata cara agama masing-masing tidak memberikan kesempatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memerlukan penetapan dari Pengadilan berdasarkan Pasal 35 sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.⁵

Dalam pertimbangan hakim disebutkan mengenai fakta yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yaitu fakta perkawinan beda agama sangat dikehendaki, namun kebutuhan sosial tersebut tidak memiliki kejelasan hukum, sehingga dapat menyebabkan penyelundupan nilai sosial dan agama atau “kumpul kebo”.⁶

Selain itu, dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks. terdapat fakta akibat dari larangan perkawinan beda agama terhadap para pemohon sebelum mengajukan

---

² Ali Mutakin, ‘Implementasi Maqashid al-Syari’ah Dalam Putusan Bahts al-Masa’il tentang Perkawinan Beda Agama’, no. 2 (2016), 301.

³ Wedya Laplata, ‘Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)’, no. 2 (2014), 75.

⁴ Nur Azizah, ‘Tinjauan *Sadd al-Dzari’ah* Terhadap Problematika Hukum Menikahi Waniita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif’, no. 1 (2018), 11.

⁵ Mahkamah Agung Rakyat Indonesia, Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?maximilian&page=4>

⁶ Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

permohonannya di Pengadilan, sehingga menyebabkan adanya anak yang telah lahir diluar dari perkawinan yang sah.⁷

Penetapan tersebut apabila ditinjau berdasarkan Hukum Islam, maka justru menimbulkan *mafsadat* berupa perkawinan beda agama. Namun akan menimbulkan *mafsadat* yang lain apabila permohonan perkawinan tersebut tidak dikabulkan karena akan terjadi kumpul kebo apalagi pemohon II telah melahirkan anak diluar nikah dengan pemohon II. Oleh karena adanya problematika tersebut, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap mengenai Permohonan Perkawinan Beda Agama dalam tinjauan konsep *Sadd Al-Dzari'ah*.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis yuridis, normatif karena berhubungan dengan pencarian landasan hukum penetapan Nomor. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks di Pengadilan Negeri Makassar tentang permohonan izin perkawinan beda agama melalui pendekatan kasus dan konseptual yang akan menguraikan *ratio decidendi* penetapan tersebut dan meninjaunya dengan konsep *saddu al-dzari'ah* yang bersumber dari bahan hukum primer berupa penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/Pn.Mks dan bahan hukum sekunder yang lain tentang Perkawinan Beda Agama melalui studi dokumen yang merangkum poin-poin utama dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan putusan tersebut, mengklasifikasi data-data tersebut menurut rumusan masalahnya, kemudian melakukan pemeriksaan ulang data yang telah dikategorikan ke sumber-sumber utamanya, setelah itu menganalisisnya menggunakan uraian perkawinan menurut Islam dan Kristen, Hukum perkawinan laki-laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslimah, Konsep *saddu al-dzari'ah*, Hukum Positif tentang perkawinan beda agama, Hak asasi manusia serta Putusan Hakim dan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis sebelumnya yang menghasilkan temuan *ratio decidendi* penetapan hakim atas permohonan tersebut berupa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989; Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia; dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kabulnya permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan ditinjau dari konsep *saddu al-dzari'ah*.

Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks Terkait Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Ratio decidendi atau *reasoning* yakni latar belakang pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.⁸ Pada penetapan No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks, Hakim memberikan sebuah ketetapan yang memperbolehkan izin dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan berbeda agama untuk dapat melangsungkan atau mencatatkan perkawinan beda agama pada Kantor Catatan Sipil di Makassar.

Isi dari pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan ketetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hakim menggunakan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam teks penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. dapat dilihat pada

---

⁷Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, (Jakarta: Kencana, 2011), 134.

kalimat, “Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dikenal dua instansi Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor catatan Sipil bagi yang beragama selain Kristen.”

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni berbunyi:⁹ (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, Hakim menggunakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni berbunyi:¹⁰ (1). Dengan mengindahkan tatacara perkawinan berdasarkan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Hakim menggunakan Pasal diatas, dikarenakan Hakim telah menimbang berdasarkan surat izin menikah dari orangtua yang telah memberikan izin/merestui dan tidak keberatan jika Pemohon I dan II ingin mencatatkan perkawinan yang berbeda agama pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil di Kota Makassar. Oleh karena itu, berdasarkan keinginan dari Pemohon I dan II telah sesuai dengan ketentuan terkait kewajiban untuk mencatatkan tiap perkawinan yang ingin diselenggarakan. Sebagaimana dalam draft penetapan Hakim Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks tentang duduk perkara, “Bahwa Pemohon I dan II telah mengatakan secara lisan *itikad* baiknya untuk melangsungkan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan II.”¹¹ Dengan adanya pernyataan tersebut, kesepakatan para Pemohon telah berkesinambungan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka pernyataan ini menjadi salah satu dari *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonannya.

Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi sebagaimana duduk perkara yang berbunyi, “Bahwa Pemohon I dan II telah sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing, yakni Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Islam.”¹² Dengan ini, maka telah sesuai dengan pertimbangan Hakim yang menimbang berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1400 K/Pdt.1986, tanggal 20 Januari 1989, yang dapat dikemukakan didalam kalimat, “menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 1400 K/Pdt.1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan.”¹³

Adapun Hakim menggunakan pertimbangan tersebut dikarenakan berdasarkan kalimat yang berbunyi, “menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia

---

⁹Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

¹²Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

¹³Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

heterogen, sangat banyak yang berkehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan/agama tersebut, *in casu* maka kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyeludupan nilai-nilai sosial maupun agama “*samen laven*” atau “kumpul kebo” ataupun penyeludupan hukum positif.”¹⁴

Dengan adanya pertimbangan Hakim tersebut, maka telah sesuai dengan duduk perkara yang berbunyi, “Bahwa Pemohon I dan II merasa bertanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah dari Pemohon I dan II.”¹⁵ Dampak negatif akan timbul jika tidak ada aturan secara jelas yang mengatur diperbolehkan atau tidak terhadap perkawinan beda agama tersebut berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, berdasarkan dengan kalimat didalam draf penetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. yang berbunyi, “menimbang, bahwa dengan putusan Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama/kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan hukumnya.”¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, ketetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. yang telah menetapkan kabulnya izin dari permohonan perkawinan beda agama dengan menimbang kecakapan para Pemohon untuk dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga dan mendengarkan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah merestui para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama dengan syarat tetap memeluk agama masing-masing.

Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang Hak Asasi berdasarkan dengan kalimat didalam draf yang berbunyi, “Menimbang, bahwa kedua Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dan Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁷ Adapun Pasal 27 berbunyi,¹⁸ (1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, Pasal 29 berbunyi,¹⁹ (1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Adanya pertimbangan Hakim tersebut, telah sesuai dengan duduk perkara para Pemohon yang sangat berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, namun memiliki keyakinan/ agama yang berbeda sebagaimana keterangan saksi bahwa pemohon akan tetap dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, berdasarkan Hak Asasi Hakim mengambil sebagai pertimbangan dalam mengabulkan izin dari permohonan perkawinan beda agama.

Pertimbangan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada teks, “menimbang berdasarkan

---

¹⁴Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

¹⁵Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

¹⁶Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

¹⁷Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

¹⁸Pasal 27 Undang-undang Dasar Replublik Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹Pasal 29 Undang-undang Dasar Replublik Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pada Pasal 35 huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan, bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” selain itu, “menimbang bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh penyidik” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.”

Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan duduk perkara pemohon, yakni yang berbunyi, “bahwa pemohon I dan II telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan II.”²⁰

Adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka pertimbangan diatas termasuk dalam *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dengan memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan terkhusus Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan..

Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Terkait Permohonan Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya setiap agama tidak ada yang menginginkan perkawinan beda agama dikarenakan perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama.²¹ Namun, yang dilarang adalah perkawinan antara seorang muslimah dengan laki-laki non muslim. Adapun ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah*, yang menjadi penyebab haramnya praktik dari perkawinan beda agama atau washilah dari pelarangan perbuatan tersebut adalah dikarenakan para ulama sepakat dengan melihat kenyataan yang terjadi bahwa seorang laki-laki yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin bagi istrinya, dan hakikat seorang istri adalah taat kepada suaminya apabila memerintahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, sebuah bahtera rumah tangga tidak akan kokoh jika terdapat perbedaan yang besar terhadap keyakinan dan prinsip.²²

Terkait aturan perkawinan beda agama juga terdapat dalam Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab larangan perkawinan yakni, pada Pasal 44 yang berbunyi,²³ “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Berdasarkan Pasal tersebut, perkawinan beda agama merupakan salah satu perkawinan yang terlarang dan tidak mungkin dilaksanakan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan yakni berbunyi, “perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi unsur rukun sebagaimana Pasal 14 yang memuat rukun

---

²⁰Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

²¹ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Soumatara Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2019) (<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>)

²²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 343.

²³Kementrian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44

perkawinan yakni diantaranya,²⁴ a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi, dan e. Ijab Kabul.

Dalam hal ini, tidak mungkin untuk melangsungkan salah satu tata cara perkawinan dari dua keyakinan yang berbeda. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama memutuskan,²⁵ “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.”

Penjelasan diatas adalah pelarangan kawin beda agama yang ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, hal tersebut disebabkan adanya dugaan kuat/tuduhan bahwa perkawinan beda agama meruntuhkan keyakinan aqiqah seorang muslimah. Namun, permasalahan yang terjadi pada penetapan 622 oleh para pemohon. Dikarenakan adanya dugaan yang kuat (*al-ifdha'*) yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang terlarang (*al-mutawashil ilaih*), yaitu adanya dugaan yang kuat akan ada *mafsadah* jika perbuatan tersebut dilakukan.²⁶

Adapun pendapat Wahbah Zuhaili yang menghendaki definisi yang netral, bahwa ia merujuk pada gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yakni “melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya/Pdt.P/2018/Pn.Mks, yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah pertimbangan hakim yang menetapkan perkawinan tersebut untuk menghindari adanya penyelundupan sosial yakni “kumpul kebo”.²⁷ Selain itu hakim menyelaraskan dengan kehendak para pemohon yang bersungguh-sungguh dalam itikad melangsungkan perkawinan.

Jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam, maka hal tersebut mengandung *mafsadat* dikarenakan adanya kekhawatiran hakim akan terjadinya penyelundupan sosial yang berupa praktik pindah agama sebelum akad perkawinan berlangsung dan setelah akad akan kembali kepada agama yang dianut masing-masing pemohon atau perbuatan asusila yakni “kumpul kebo” mengingat telah lahir anak diluar perkawinan yang sah dari para pemohon.

Perkawinan beda agama yang dilihat dari kasus pada penetapan 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks, jika ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah* adalah sebuah langkah preventif yang berupa pencegahan dengan mengabulkan perkawinan beda agama yang diajukan. Jadi, meskipun hakim telah menimbang unsur-unsur mashlahah didalam penetapan 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks, namun jika ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah* menurut Wahbah Zuhaili, perkara tersebut tetaplah dilarang dan tidak boleh dilakukan. Karena jika dilihat dari segi hukumnya menurut Al-Qarafi, yaitu “bahwa sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang”²⁸ sedangkan, menurut penjelasan sebelumnya perkawinan beda agama ini telah jelas dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama, fatwa MUI, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, terdapat sebuah *qowa'id fiqhiyyah* yang berbunyi, “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*mashlahah*)”.

Mengingat adanya *mafsadat* jika perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks tidak dikabulkan oleh

---

²⁴Kementrian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

²⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, [Http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf](http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf) Diakses 08/12/2019

²⁶Muhammad Hisyam Burhan, *Sadd Al-Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Damaskus: Darr-Fikr, 1985) 103-122

²⁷Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks.

²⁸Ja'far b in Abdurrahman Qasas, *Qaidatu Saddu Dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*, (t.tp.:t.p.,1431 H), 11

hakim, namun dalam hal ini, kabulnya permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.mks tidak dapat dibenarkan berdasarkan *sadd al-dzari'ah* yang dilihat dari segi hukumnya meskipun hakim telah memuat unsur masalah. Selain itu terdapat kaidah yang berbunyi “apabila dikumpulkan suatu yang haram dengan yang halal, maka suatu yang haram akan mengalahkan yang halal”²⁹

Kesimpulan

Ratio decidendi Hakim dalam memberikan ketetapan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks adalah disebabkan tidak adanya larangan perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan beda agama, namun setiap perkawinan tetap harus dicatatkan oleh lembaga berwenang berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Hakim, kasus ini adalah *in casu*, sehingga hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dengan menimbang keyakinan masing-masing dari pemohon tidak akan berubah; Pasal 27 dan 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dengan menimbang hak asasi atas kehendak para pemohon yang ingin memiliki kehidupan berkeluarga yang sah secara negara; dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi peluang bahwa perkawinan beda agama dapat menjadi sah dengan ketetapan dari Pengadilan Negeri. Perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Hakim tersebut untuk menghindari adanya penyeludupan hukum mengingat telah lahir seorang anak dari perkawinan yang tidak sah oleh Para Pemohon.

Adapun Hakim menetapkan kabulnya permohonan perkawinan beda agama hanya berdasarkan prosedur tata cara perkawinan agar sah secara negara dan bertujuan agar dapat dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan sipil, tanpa melihat hukum agama dari para pemohon terutama pemohon II yang beragama Islam. oleh karena itu, dikarenakan Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang ini, Hakim menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 sebagai solusi untuk diperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat para pemohon tetap pada keyakinan masing-masing. Namun, jika ditinjau berdasarkan *sadd al-dzari'ah* dari segi hukum bahwa perkara yang telah disepakati para ulama terkait larangannya, maka tidak dapat dibenarkan meskipun terdapat mafsadat dan terdapat unsur mashlahah dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Daftar Pustaka

- Al Suyuti, Abdurrahman Bin Abi Bakar. *Al Asybah Wannadzair*. Islamic Book, 2010.
- Asmin. *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Azizah, Nur. “Tinjauan Sadd al-Dzari’ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Waniita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif”, no. 1 (2018), 11. (<http://dx.doi.org/10.30984/jis.v1i1.645>)
- Burhan, Muhammad Hisyam. *Sadd Al-Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Al- Islamiyyah*. Damaskus: Darr-Fikr, 1985.

---

²⁹Abdurrahman Bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wannadzair*, (Islamic Book, 2010), 68

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, <Http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf> Diakses 08 Desember 2019.
- Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Soumatra Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2019) (<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>)
- Kementrian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Laplata, Wedya. “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), no. 2 (2014), 75. (<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4206>)
- Mahkamah Agung Rakyat Indonesia, Salinan penetapan nomor 622/Pdt.P/PN.Mks. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?=-maximilian&page=4>)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet.II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mutakin, Ali. “Implementasi Maqashid al-Syari’ah Dalam Putusan Bahts al-Masa’il tentang Perkawinan Beda Agama’, no. 2 (2016), 301. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6328/3843>)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Qasas, Ja’far bin Abdurrahman. *Qaidatu Saddu Dzarai’ wa atsaruha al fiqhiyyu*. t.tp.:t.p.,1431 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Ter. Moh. Abidun, Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Undang-undang Dasar Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.